

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2020-2025 di Kabupaten Kampar

Rudy Dwiyanto¹ Masrul Ikhsan²

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: rudy.dwyant3999@student.unri.ac.id¹ masrul.ikhsan@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Implementasi kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam memperkuat industri pariwisata di daerah ini sangat penting untuk mendukung perkembangan dan keberhasilan pembangunan pariwisata di tingkat nasional. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar memiliki tanggung jawab untuk secara berkelanjutan mengelola potensi yang bisa dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata alam di Kabupaten Kampar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2020 serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata alam di Kabupaten Kampar mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini ialah jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian adalah Dinas Pariwisata dan Kubudayaan Kabupaten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata alam di Kabupaten Kampar dianggap berhasil, sebab komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata telah dilakukan dengan menyampaikan informasi kepada semua pihak terkait dan konsisten dalam menjalin komunikasi. Dan sumber daya meliputi sumber daya manusia, finansial, material, dan informasi, namun untuk sumber daya informasi masih terdapat kekurangan. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan destinasi wisata alam di Kabupaten Kampar.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengembangan Pariwisata Alam

Abstract

The implementation of the Kampar Regency Tourism and Culture Office's policy in strengthening the tourism industry in this area is very important to support the development and success of tourism development at the national level. The Kampar Regency Tourism and Culture Office has the responsibility to sustainably manage potential that can be developed. This study aims to analyze and describe the implementation of nature tourism development policies in Kampar Regency in accordance with Kampar Regency Regional Regulation Number 14 of 2020 and identify and analyze the factors that hinder the implementation of nature tourism development policies in Kampar Regency referring to Kampar Regency Regional Regulation Number 14 of 2020. The type of research used in this writing is a qualitative research type. The location of the research is the Department of Tourism and Culture of Kampar Regency. The research results indicate that the implementation of the nature tourism development policy in Kampar Regency is considered successful, as communication in the implementation of the tourism policy has been carried out by disseminating information to all relevant parties and consistently maintaining communication. Resources include human, financial, material, and information resources, but information resources are still lacking. Challenges faced in developing nature tourism destinations in Kampar Regency.

Keywords: Implementation, Policy, Development of Nature Tourism



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pariwisata di Kabupaten Kampar merupakan salah satu bidang terpenting untuk meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan

pariwisata yang baik akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Potensi dan sumber-sumber Sumber daya alam yang sudah ada dapat diubah menjadi destinasi wisata menarik. Banyak sumber daya alam telah dimanfaatkan dan dijadikan berbagai objek wisata. Pariwisata alam di Kabupaten Kampar berhasil meraih juara pertama Anugerah Pesona Indonesia (API) 2020 dalam kategori Surga Tersembunyi Terpopuler. Daya tarik pariwisata alam menjadi tujuan bagi wisatawan untuk berkunjung adalah keindahan alam, seni, dan budayanya, tidaklah mengherankan bahwa potensi ini menarik untuk dikembangkan. Di dalam pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kampar Tahun 2020-2025 kebijakan pembangunan kepariwisataan adalah sebagai berikut:

1. perencanaan pembangunan destinasi pariwisata dan kawasan strategis pariwisata;
2. penegakan regulasi pembangunan destinasi pariwisata dan kawasan strategi pariwisata
3. pengendalian implementasi Pembangunan Destinasi Pariwisata dan kawasan Pariwisata;
4. membangun kerjasama yang sinergis dengan semua pihak untuk percepatan pembangunan industry pariwisata Kampar;
5. pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global;
6. memanfaatkan semua sumber daya secara bijaksana untuk pembangunan pariwisata yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat; dan
7. membangun dan mengembangkan DTW yang berkualitas dan ditunjang dengan pengelolaan yang bertaraf internasional.

Pembangunan destinasi pariwisata bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam, budaya, dan lingkungan melalui pengembangan pariwisata berkelanjutan, namun pada kenyataannya pembangunan pariwisata yang terjadi masih bersifat massal sehingga berpotensi mengurangi kualitas sumber daya alam, budaya, dan lingkungan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pariwisata dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pariwisata dan kebudayaan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumuskan kebijakan teknis pelaksanaan operasional pembangunan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan skala Kabupaten.
2. Penyelengaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan kebudayaan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pariwisata dan Kebudayaan
4. Pelaksanaan pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan
5. Pelaksanaan kebijakan promosi dan pemasaran Pariwisata dan Kebudayaan
6. Pelaksanaan rencana induk pengembangan pariwisata
7. Pelayanan Administrasi
8. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Prinsip pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kampar diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Adapun penetapan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kampar tahun 2020-2025 bertujuan untuk:

1. Mewujudkan destinasi pariwisata yang halal, aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan serta berwawasan lingkungan sebagai basis keunggulan daya saing kepariwisataan;
2. Mewujudkan kontribusi pariwisata bagi pelestarian tradisi dan budaya, peningkatan kapasitas sosial dan perekonomian masyarakat lokal secara berkeadilan;
3. Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisataan dan tata Kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran pariwisata dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien; dan
4. Mewujudkan tata kelola Kepariwisataan yang baik dan bertanggungjawab, mencakup aspek perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Melihat peranan yang begitu besar maka pariwisata perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Pembangunan bidang Pariwisata dan Kebudayaan merupakan bagian integral dalam pembangunan secara nasional. Pariwisata dan Kebudayaan merupakan asset yang besar bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan karena bangsa Indonesia sangat kaya dengan potensi budaya dan tradisinya, keindahan alam serta posisi Indonesia yang terletak dalam lintasan Benua Asia dan Australia serta lintasan Samudra Hinda dan Samudra Fasifik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 9 ayat (3) menjelaskan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Pasal 11 ayat (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Jelas dalam UU RI no. 23 tahun 2014 ini menjelaskan bahwa pariwisata termasuk dalam urusan pemerintah pilihan dan bagaimana pemerintah daerah melaksanakan tugas pemerintahan mengelola pariwisata. Dimana kedudukan dan peran sektor pariwisata saat sangat penting dan berkontribusi dalam pendapatan daerah, penerimaan devisa, penyerapan tenaga kerja di sekitar objek wisata.

Terdapat 41 wisata alam yang tersebar di 13 Kecamatan di Kabupaten Kampar. Namun dalam pengelolaan pariwisata alam tersebut belum dilakukan secara maksimal, kesiapan masyarakat dalam menyambut wisatawan lokal atau wisatawan mancanegara masih kurang, serta kurangnya kesadaran masyarakat pemilik usaha pariwisata alam untuk mendaftarkan usahanya sehingga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sulit mempromosikan destinasi pariwisata tersebut. Sumber daya Manusia di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar serta Sumber daya manusia pengelola destinasi pariwisata alam tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus di bidang pariwisata, sehingga pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata alam di Kabupaten Kampar belum berjalan dengan maksimal. Anggaran pengembangan sumber daya pariwisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar dari tahun 2022 sampai 2024 mengalami peningkatan, hal ini merupakan keseriusan nya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam melakukan pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Kampar. Oleh karena itu, seharusnya Pemerintah Daerah memperhatikan permasalahan dan memberikan solusi kepada pelaku pariwisata alam yang ada di Kabupaten Kampar dengan membuat kebijakan-kebijakan pembangunan dan pengembangan pariwisata alam yang berada di Kabupaten Kampar. Kebijakan pengembangan pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur pariwisata, Kebudayaan Kabupaten Kampar terdiri dari:

1. Pembangunan pariwisata dan Kebudayaan dilakukan dengan mengembangkan dan mendayagunakan sumber dan potensi pariwisata dan kebudayaan daerah menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan untuk memperluas dan pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta meningkatkan nilai-nilai sportifitas. Dalam pembangunan pariwisata tetap dijaga terpeliharanya kepribadian bangsa di daerah serta kelestarian mutu lingkungan.
2. Dalam rangka pembangunan pariwisata dan Kebudayaan perlu ditingkatkan langkah-langkah terarah dan terpadu dalam pengembangan objek wisata, kegiatan promosi pelatihan pramuwisata, penyediaan sarana dan prasarana pariwisata, Kebudayaan serta peningkatan mutu penyelenggaraan pariwisata, event Kebudayaan.
3. Peningkatan kemampuan para pengelola objek wisata, pengusaha jasa wisata dan pemandu wisata serta pengurus organisasi Kebudayaan.
4. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata, Kebudayaan perlu ditingkatkan melalui kegiatan pembinaan kelompok-kelompok sadar wisata, industri kerajinan, organisasi Budaya. Oleh karena itu perlu dicegah hal-hal yang dapat merugikan kehidupan masyarakat serta kepentingan pertahanan dan keamanan.
5. Pengembangan potensi wisata, Budaya daerah melalui perbaikan sarana dan prasarana, penataan kawasan, pengembangan kegiatan wisata di masyarakat.

Dari uraian kebijakan pengembangan pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur pariwisata, Kebudayaan Kabupaten Kampar diatas masih belum maksimal. Salah satunya belum tersedianya sarana dan prasarana sebagai akses penunjang dalam pengembangan destinasi pariwisata alam tersebut. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah seperti masih kurang nya mushola, toilet yang masih sangat sedikit, dan belum adanya jaringan listrik di objek wisata alam di Kabupaten Kampar. Dalam melakukan perkembangan destinasi pariwisata alam tersebut tentunya harus dengan menetapkan kebijakan-kebijakan yang sangat efektif, sehingga kebijakan-kebijakan yang telah tersusun dan direncanakan dalam pengembangan objek pariwisata alam tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Perkembangan destinasi pariwisata alam di Kabupaten Kampar juga nantinya dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan pada destinasi pariwisata tersebut. Selain untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan meingkatkan perekonomian masyarakat sekitar destinasi wisata alam, perkembangan destinasi pariwisata tersebut juga nantinya akan dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Kampar.

Target untuk tahun 2023 sebanyak 3.288.139 Orang, sedangkan capaian realisasi jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kampar pada tahun 2022 sebanyak 1.998.748 Orang mencapai target kenaikan 105 % yang telah ditetapkan, terjadi penaikan jumlah kunjungan sebanyak 1.289.391 Orang (97%). Pariwisata alam di Kabupaten Kampar yang menyumbang besar wisatawan yang berkunjung tahun 2023 terdapat di Kecamatan XIII Koto Kampar sebanyak 893.177 Orang. Pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar merupakan wisata alam yang memiliki ciri khas perbukitan dan memiliki pemandangan danau PLTA Koto Panjang. Oleh karena itu wisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar merupakan Wisatawan favorit yang dikunjungi masyarakat. Untuk itu diperlukannya implementasi kebijakan terhadap destinasi pariwisata alam di Kabupaten Kampar. Pada tahun 2021 - 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar telah membangun ataupun menyelesaikan pembangunan 9 unit sarana dan prasarana pariwisata, dengan dibangunnya berbagai sarana dan prasarana objek wisata dan kebudayaan di Kabupaten Kampar seperti yang tertera pada data di atas dapat meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke wisata alam yang ada di Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Pengamatan Peneliti di lapangan maka ditemui beberapa fenomena penelitian yaitu sebagai berikut: Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang objek wisata alam di Kabupaten Kampar. Masih minimnya promosi destinasi pariwisata alam yang ada di kabupaten Kampar. Masih kurangnya pembangunan Infrastruktur seperti jalan, listrik di objek wisata alam Kabupaten Kampar. Kurangnya pengelolaan lingkungan atau sampah di objek wisata alam. Banyak wisata alam di Kabupaten Kampar yang masih sulit di jangkau transportasi umum. Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan sesuai yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2020-2025 di Kabupaten Kampar". Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut, yaitu: Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Alam di Kabupaten Kampar? Apa Saja Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Alam di Kabupaten Kampar? Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk Menganalisis dan Mendeskripsikan Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Alam di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2020. Untuk Mengidentifikasi dan Menganalisis Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Alam di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah jenis penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis pendekatan penelitian dalam ilmu sosial yang menggunakan paradigma alamiah (Abdussamad, 2021). Metode Kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting. Dari Tujuan Penelitian Kualitatif ini pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang di eksplorasi dalam penelitian. Tujuan penelitian kualitatif juga menyatakan rancangan penelitian yang dipilih. Tujuan ini dituliskan dengan istilah-istilah "Teknis" Penelitian ini bersumber dari Bahasa Penelitian Kualitatif . Penelitian ini ditinjau dari pemaparannya termasuk penelitian Deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mengumpulkan fakta dan menguraikan keseluruhan dari persoalan yang akan diselesaikan. Penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran umum mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Alam di Kabupaten Kampar. Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata dan Kubudayaan Kabupaten kampar. Alasan pemilihan lokasi Penelitian ini yaitu yang memiliki Kewenangan dalam pengembangan pariwisata alam di Kabupaten Kampar.

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang paling penting dalam suatu penelitian. Peneliti yang melakukan penelitian tidak akan mendapatkan data yang diinginkan jika tidak mengetahui metode dalam pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Data Primer. Data primer adalah data yang diproleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus

mengumpulkannya secara langsung. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau interview dari pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar, Pengelola Pariwisata Alam, Tokoh Masyarakat di sekitar pariwisata alam dan wisatawan pariwisata alam.

2. Data Sekunder. Sumber data selanjutnya yang digunakan penulis berupa data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang ada, terdiri atas: Pariwisata Alam di Kabupaten Kampar Tahun 2024. Tingkat Pendidikan PNS dan Pegawai Bantu Tidak Tetap 2024. Jumlah kunjungan Wisatawan Tahun 2017-2023. Jumlah kunjungan wisatawan pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar Tahun 2023. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kampar Tahun 2020-2025 kebijakan pembangunan kepariwisataan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi. Observasi merupakan Teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Teknik ini dimaksud untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Alam di Kabupaten Kampar. Dalam pengamatan ini peneliti di perkuat dengan adanya data-data, baik dalam bentuk tertulis ataupun *soft copy* yang peneliti dapatkan dari Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, data tersebut diteliti dan dipahami lebih dalam secara berulang-ulang untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. Wawancara. Wawancara merupakan situasi sosial antara dua orang, dimana proses psikologis yang terlibat membutuhkan kedua individu secara timbal balik dalam memberikan beragam tanggapan sesuai tujuan penelitian. Dalam wawancara terstruktur, peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan standar. (Hardani, 2020).
3. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Dengan dokumentasi maka yang diamati bukanlah benda hidup tetapi benda mati (Masayu Rosidah, 2021). Teknik ini peneliti gunakan untuk memperkuat validitas data primer atau data utama yang peneliti peroleh dari para informan. teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Alam di Kabupaten Kampar. Dokumentasi dalam penelitian sebagai sumber data karena banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Alam di Kabupaten Kampar

Pelaksanaan kebijakan adalah tahap di mana suatu kebijakan pemerintah diterapkan melalui peraturan atau program yang telah dirancang sebelumnya, untuk mencapai tujuan dari pembentukan kebijakan itu. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan hasil penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata alam di Kabupaten Kampar, serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut di Kabupaten Kampar. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar berperan sebagai sektor utama yang mengelola

urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kampar. Teori yang diterapkan penulis dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan yang mengacu pada model yang telah dikembangkan oleh Edwards seperti yang telah dibahas sebelumnya.

Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting untuk kelancaran sebuah organisasi/lembaga, termasuk dalam penyebaran visi dan misi, strategi, serta arah kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat melalui komunikasi yang terjalin. Komunikasi berfungsi sebagai jembatan antara pemangku kebijakan dan pelaksana kebijakan, baik di antara lembaga pemerintah maupun lembaga lainnya seperti sektor pariwisata, serta untuk membangun interaksi pribadi dengan aktor-aktor pariwisata di Kabupaten Kampar dalam menyampaikan keinginan dan rencana pelaksanaan program pariwisata. Komunikasi yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana cara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam menyebarluaskan dan mempromosikan implementasi kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar terkait pengembangan objek wisata alam di Kabupaten Kampar kepada masyarakat serta wisatawan yang berkunjung ke objek wisata alam. Terdapat beberapa sub indikator dalam penilaian komunikasi terkait implementasi kebijakan, di antaranya sebagai berikut:

Tranformasi Informasi (*transimisi*)

Transmisi komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan proses pengiriman atau penyaluran informasi dari pihak berwenang atau perancang kebijakan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Proses penyampaian ini krusial untuk menjamin bahwa pesan atau informasi mengenai kebijakan yang akan dilaksanakan dapat diteruskan dengan jelas, akurat, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan yang terkait. Penyebaran informasi yang efektif, sehingga kebijakan tidak hanya disampaikan kepada para pelaksana tetapi juga dapat diterima oleh kelompok yang sasaran. Transmisi komunikasi yang dibahas dalam penelitian ini adalah komunikasi antara pelaksana kebijakan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam mensosialisasikan kebijakan pengembangan pariwisata kepada masyarakat yang tinggal di objek pariwisata alam di Kabupaten Kampar. Komunikasi ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar melalui rapat koordinasi antara pelaksana kebijakan. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan program-program pengembangan pariwisata serta melakukan pemantauan terhadap program yang telah dilaksanakan, serta menyelesaikan masalah teknis di lapangan yang muncul dalam pelaksanaan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Proses transisi ini untuk memastikan bahwa pesan atau informasi mengenai kebijakan yang akan dilaksanakan dapat disampaikan dengan akurat, jelas, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan yang terlibat. Penyampaian informasi yang efektif, sehingga kebijakan tidak hanya diberikan kepada para pelaksana tetapi juga dapat diterima oleh kelompok yang dituju. Interaksi antara masyarakat dan pemerintah berlangsung efektif melalui pertemuan atau forum konsultasi, sehingga informasi dapat disampaikan dengan baik kepada semua pihak terkait.

Kejelasan Informasi (*Clarity*)

Kejelasan informasi dalam komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan terkait dengan seberapa jelas dan mudahnya para pemangku kepentingan menangkap pesan atau informasi yang disampaikan dalam proses implementasi kebijakan. Kejelasan informasi memiliki peranan penting untuk mendukung kelancaran komunikasi informasi antara Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dengan bagian-bagiannya dan masyarakat di lokasi pariwisata alam di Kabupaten Kampar. Kejelasan informasi adalah aspek penting dalam komunikasi karena dapat memengaruhi sejauh mana pesan dapat dipahami, diterima, dan diterapkan dengan tepat oleh penerima. Setelah kebijakan disampaikan kepada pelaksana dan kelompok sasaran dengan jelas, masing-masing memahami maksud dan tujuan kebijakan yang diterapkan, sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk menjamin keberhasilan kebijakan agar berjalan efektif. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar menggunakan cara komunikasi yang baik dan menyampaikan informasi dengan efektif. Tujuannya untuk meningkatkan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata alam di Kabupaten Kampar. Dinas Pariwisata juga membuat kegiatan dan program untuk memberikan informasi dengan jelas melalui media sosial dengan menyebarkan informasi menggunakan situs web dan platform media sosial yang dikelola oleh Dinas Pariwisata. Langkah ini dilakukan untuk memperkenalkan objek wisata, potensi terbaik yang dimiliki wisata alam di Kabupaten Kampar, dan kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata kepada masyarakat secara luas. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar telah menjalankan kebijakan pengembangan wisata alam dengan baik. Dinas Pariwisata telah memperbarui akses informasi dengan menggunakan berbagai cara, seperti situs web yang menyajikan informasi terbaru mengenai objek wisata, kegiatan budaya, dan aktivitas pariwisata. Dengan meningkatnya kejelasan informasi melalui situs web, diharapkan akan ada peningkatan jumlah pengunjung wisata. Masih ada kekurangan dalam kejelasan informasi. Beberapa wilayah di Kabupaten Kampar mengalami keterbatasan dalam akses jaringan yang memadai, yang menyebabkan masyarakat belum dapat memperoleh informasi tersebut.

Konsistensi Informasi (*Consistency*)

Konsistensi diperlukan agar kebijakan tetap tidak berubah; jika kebijakan tidak konsisten, ini dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dan kelompok sasaran, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak optimal. Konsistensi dalam berkomunikasi saat menjalankan kebijakan pariwisata merupakan faktor penting untuk mencapai keberhasilan dan keberlangsungan dalam pengembangan sektor pariwisata. Konsistensi dalam komunikasi merujuk pada pengiriman pesan yang serupa secara berulang kepada berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat dalam industri pariwisata. Konsistensi dalam berbicara memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan sasaran dari kebijakan pariwisata. Pengiriman informasi yang tegas dan seragam akan mencegah munculnya kebingungan serta kesalahpahaman yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan pariwisata, sangat penting untuk memberikan informasi yang beragam kepada masyarakat, baik yang berdomisili di area tersebut maupun kepada para pengunjung. Konsistensi dalam komunikasi memastikan bahwa informasi yang diberikan selalu tepat dan dapat dipercaya. Komunikasi yang rutin membantu dalam mengawasi perkembangan pelaksanaan kebijakan pariwisata. Apabila terdapat perubahan atau penyesuaian yang perlu diterapkan, pemangku kepentingan akan lebih mudah memahami dan melaksanakan perubahan itu jika komunikasi yang telah dilakukan sebelumnya berjalan dengan baik. Untuk mempertahankan konsistensi komunikasi yang efektif, penting dilakukan pemantauan rutin melalui forum komunikasi yang melibatkan masyarakat, sehingga potensi masalah bisa segera diminimalisir agar pelaksana dapat cepat mengambil tindakan perbaikan. Untuk memastikan komunikasi tetap efektif dan berkelanjutan, diperlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Diperlukan kejelasan dalam kebijakan agar kebijakan yang diterapkan tetap konsisten, sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Dalam rangka menjaga keselarasan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata alam di

Kabupaten Kampar, sangat penting untuk melakukan komunikasi yang efisien, berkoordinasi dengan pihak ketiga, mengadakan pertemuan secara rutin, menyusun rencana jangka panjang, serta memastikan transparansi kebijakan kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, agar tujuan dari kebijakan pengembangan pariwisata dapat tercapai dengan baik.

Sumberdaya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan pariwisata mengacu pada berbagai komponen yang berfungsi sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan pariwisata secara efektif dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata mencakup semua elemen dan faktor yang diperlukan untuk mewujudkan serta mendukung tujuan pariwisata suatu wilayah atau negara. Dalam konteks ini, sumber daya mengacu pada modal atau aset yang menjadi dasar untuk pengembangan, pengelolaan, dan pemasaran objek wisata. Sumber daya tersebut dapat berupa, sumberdaya manusia, anggaran, dan informasi. Sumber daya merupakan elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab kepada Bupati Kampar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar. Majunya suatu pariwisata tentunya tidak terlepas dari sumber daya yang berkualitas di dalamnya seperti yang tertuang dalam teori Edward III. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, sumber daya dana, sumber daya alat, dan sumber daya wewenang. Namun persoalan utama sering kali berkaitan dengan sumber daya manusia yang terlibat.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata adalah elemen yang sangat penting dan mempengaruhi keberhasilan sektor pariwisata di suatu daerah atau negara. Sumber daya manusia mencakup semua individu yang terlibat dalam industri pariwisata, termasuk pekerja di sektor pariwisata serta berbagai pihak lain yang terkait. Sumber daya manusia juga berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang sesuai dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang yang dibutuhkan. Sumber daya manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pembangunan pariwisata alam di Kabupaten Kampar dan pengelola serta masyarakat yang berperan serta untuk memberikan saran dan masukan untuk menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan. Seperti halnya perangkat daerah lain di Kabupaten Kampar, saat ini kondisi Sumber Daya Aparatur di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar juga masih kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas, profesional, berpengetahuan, dan berpengalaman dalam mengelola organisasi atau lembaga adalah faktor utama agar organisasi dapat beroperasi dengan optimal. Terdapat dua tahapan dalam menentukan sumber daya manusia untuk menerapkan kebijakan pengembangan pariwisata. Tahapan pertama adalah melakukan analisis menyeluruh mengenai kebutuhan di sektor pariwisata. Tahapan kedua adalah merekrut staf atau pelaksana sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, kemudian melaksanakan program pelatihan bersama lembaga pendidikan yang fokus pada pelatihan pariwisata, guna mengoptimalkan program pelatihan agar selaras dengan kebutuhan kebijakan pengembangan pariwisata.

Sumber Daya Anggaran

Sumber daya keuangan dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata merujuk pada berbagai bentuk dana dan sumber daya finansial yang diperlukan untuk mendukung serta melaksanakan

kebijakan, program, dan proyek pariwisata di suatu daerah atau negara. Sumber daya keuangan ini sangat penting untuk mendanai berbagai aspek pengembangan, pemasaran, pengelolaan, dan peningkatan destinasi wisata. Dana finansial dimanfaatkan untuk mengembangkan dan memperbarui infrastruktur pariwisata, mencakup pembangunan serta pemeliharaan jalan, bandara, pelabuhan, fasilitas transportasi umum, dan tempat tinggal. Peningkatan aksesibilitas destinasi dan kenyamanan wisatawan membutuhkan investasi yang memadai dalam infrastruktur pariwisata. Dana diperlukan agar dapat mendanai pengelolaan tempat wisata, mencakup biaya operasional kantor pariwisata, pengawasan lingkungan, kebersihan, serta pemeliharaan situs-situs bersejarah dan warisan budaya. Sebagian dari sumber daya keuangan dapat dialokasikan untuk mendukung peningkatan kapasitas komunitas lokal agar mereka bisa terlibat dan mendapatkan keuntungan dari sektor pariwisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sebagai lembaga publik yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam menjalankan pengembangan dan pembangunan wisata alam di Kabupaten Kampar. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar perlu memiliki anggaran yang memadai untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditentukan. Sumber daya anggaran ini adalah elemen yang sangat penting dalam implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Kampar. Jika alokasi dana cukup besar, maka pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang ditentukan. Akan tetapi, jika alokasi anggaran sangat rendah, maka pencapaian kebijakan akan sulit dan tidak akan sukses. Dalam penelitian ini, dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk pengembangan sektor pariwisata di kabupaten Kampar sangatlah minim. Dana yang dipakai untuk pelaksanaan kebijakan berasal dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, dana tersebut digunakan untuk mendanai pengembangan yang berkaitan dengan pariwisata alam. Di samping itu, sektor pariwisata juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah, terutama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Fasilitas

Sumber daya fisik seperti fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan program pengembangan pariwisata alam. Sumber daya keuangan dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata alam di Kabupaten Kampar merujuk pada semua jenis dana dan sumber finansial yang dibutuhkan untuk mendukung serta melaksanakan kebijakan, program, dan pengembangan pariwisata di suatu daerah atau negara. Dana anggaran ini penting untuk mendukung berbagai elemen pengembangan, promosi, pengelolaan, dan peningkatan destinasi wisata. Dana keuangan dimanfaatkan untuk membangun serta memperbarui infrastruktur pariwisata, yang mencakup pembangunan dan pemeliharaan jalan, sarana transportasi umum, dan tempat penginapan. Pembangunan infrastruktur pariwisata alam yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kemudahan akses destinasi serta kenyamanan para wisatawan. Pengelolaan serta pemeliharaan sumber daya material ini secara optimal sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata. Dengan menjamin ketersediaan serta mutu sumber daya material yang cukup, destinasi wisata dapat menyajikan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan bagi pengunjung, sekaligus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu wilayah. Pengelola objek wisata alam di Kabupaten Kampar mengharapkan dukungan untuk pengembangan fasilitas yang ada di objek wisata alam Kecamatan XIII Koto Kampar, baik dari Pemerintah Desa, terutama dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar yang berperan sebagai sektor utama dalam pengembangan pariwisata daerah. Karena masih terdapat banyak aspek yang perlu diperbaiki terkait pengembangan fasilitas-fasilitas yang ada di objek wisata alam di Kabupaten Kampar. Agar di masa depan dapat membantu

memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan wisata alam dan mampu menarik minat pengunjung untuk berkunjung ke objek wisata alam yang terdapat di Kabupaten Kampar.

Disposisi

Disposisi dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata berkaitan dengan cara penugasan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab kepada berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan pariwisata. Dalam konteks ini, para pihak yang terlibat dapat mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pariwisata, komunitas lokal, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya. Disposisi perlu menjamin bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata memiliki peran yang tegas dan tanggung jawab yang mendetail. Contohnya, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk merancang kebijakan nasional, pemerintah daerah bertugas untuk melaksanakan kebijakan itu sesuai situasi lokal, dan lembaga pariwisata berperan dalam mempromosikan objek wisata. Penataan harus memperhatikan penjatahan sumber daya yang sesuai untuk setiap pihak sehingga dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Ini mencakup anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur, dan sebagainya. Incentif dalam pelaksanaan kebijakan mengacu pada berbagai dorongan atau stimulus yang diberikan oleh pembuat kebijakan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan untuk mendorong dan memotivasi mereka mencapai tujuan kebijakan itu. Incentif dapat berupa benda maupun non-benda dan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi, kinerja, dan pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Memberikan dorongan berupa peningkatan keuntungan atau biaya kepada para pelaksana, khususnya kepada pihak swasta. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan motivasi dalam diri dan organisasi agar dapat mencapai tujuan kebijakan. Dalam memberikan incentif kepada pelaksana atau pegawai terdapat beberapa kriteria, di antaranya mempertimbangkan sejauh mana kontribusi dalam peningkatan pelaksanaan kebijakan serta faktor peningkatan pelayanan yang dapat memengaruhi pemberian incentif. Pengalokasian incentif bagi pelaksana atau pegawai diatur dalam berbagai peraturan, termasuk undang-undang ketenagakerjaan. Penentuan incentif didasarkan pada beberapa kriteria, termasuk menilai sejauh mana kontribusi dalam peningkatan pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata alam serta kriteria perbaikan pelayanan. Selain itu, dalam tahapan pemilihan dan penempatan karyawan, yang harus terpilih adalah orang-orang yang memiliki komitmen, antusiasme, dan dedikasi yang kuat untuk mencapai tujuan kebijakan demi kepentingan masyarakat. Dalam proses rekrutmen pegawai birokrasi untuk pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata, perekrutan wajib mengikuti prosedur operasional standar yang telah ditetapkan. SOP dibutuhkan dalam perekrutan untuk menghindari ketidakteraturan dalam proses pemilihan, dan pengangkatan birokrasi juga harus dirancang dengan baik dan teliti untuk memastikan kesesuaian kebutuhan staf pelaksana. Proses penunjukan birokrasi krusial melibatkan individu-individu berpengalaman di sektor pariwisata alam agar pegawai atau pelaksana tersebut mengerti tugas dan tanggung jawabnya.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pada pelaksanaan kebijakan pariwisata merupakan organisasi serta hierarki yang terdiri dari sejumlah unit dan lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk merumuskan, melaksanakan, dan memantau kebijakan-kebijakan pariwisata. Struktur birokrasi ini berperan signifikan dalam pengelolaan serta pengembangan sektor pariwisata di suatu negara atau wilayah. Struktur organisasi dalam sebuah lembaga mengatur alur kerja pegawai sehingga setiap pegawai memiliki tanggung jawab tersendiri dan tidak mengganggu tugas pegawai lainnya. Agar proses dalam administrasi dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan kebijakan

terdapat standar operasional prosedur (SOP) yang berfungsi sebagai acuan bagi pelaksana untuk bertindak.

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan kebijakan pariwisata adalah sekumpulan instruksi atau panduan tertulis yang mengatur tahap-tahap atau prosedur yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata alam di Kabupaten Kampar. SOP bertujuan untuk menciptakan konsistensi, efisiensi, dan kualitas dalam tindakan yang berkaitan dengan pariwisata, serta untuk memastikan bahwa semua prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan dapat terlaksana dengan baik. SOP bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan keraguan dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata. Dengan merinci langkah-langkah yang perlu diikuti dan menyediakan instruksi yang jelas, SOP mendukung para pelaksana untuk mengerti apa yang diharapkan serta bagaimana cara melakukannya. Keberadaan SOP memungkinkan pelaksanaan kebijakan pariwisata dapat dilakukan dengan lebih efektif. Para pelaksana dapat melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan tanpa harus mencari tahu langkah apa yang perlu diambil atau cara untuk melakukannya. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa SOP harus selalu disesuaikan dengan situasi dan konteks lokal serta dibuat dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang relevan. SOP yang efisien harus tegas, relevan, dan sejalan dengan tujuan kebijakan pariwisata yang hendak dicapai. SOP juga harus diperbaharui secara berkala untuk dapat beradaptasi dengan perubahan kebijakan atau keadaan yang mungkin timbul dalam sektor pariwisata alam di Kabupaten Kampar. Hal yang paling penting dalam SOP ini adalah mengenai keamanan pengunjung di destinasi wisata alam. SOP keselamatan wisata alam harus dilaksanakan sesuai prosedur agar jika terjadi sesuatu seperti kebakaran atau bencana alam, penanganannya atau evakuasi darurat dapat dilakukan dengan cepat.

Fragmantasi

Fragmentasi merupakan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan yang melibatkan organisasi eksternal tanpa adanya tumpang tindih. Fragmentasi dalam pengimplementasian kebijakan pariwisata merujuk pada situasi di mana pelaksanaan kebijakan pariwisata alam terpisah menjadi segmen-semen yang tidak saling terhubung dengan baik. Dalam konteks ini, penerapan kebijakan tidak berlangsung dengan baik atau efisien disebabkan oleh adanya pemisahan dan ketidakselarasan antara berbagai elemen atau unit yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar berkolaborasi dengan lembaga pendidikan atau universitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, yang menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata bekerja sama dengan pihak lain dalam menerapkan kebijakan pengembangan pariwisata, tentunya tanpa adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dalam melaksanakan kebijakan pariwisata, Dinas Pariwisata membagi tanggung jawab dengan berkolaborasi bersama pelaku industri pariwisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam memfasilitasi pembagian tugas dan kewajiban melibatkan asosiasi pariwisata agar memperoleh perspektif dari berbagai pihak atau pemangku kepentingan serta memahami potensi wisata alam di Kabupaten Kampar. Selanjutnya menjalin kerjasama dengan institusi Pendidikan khusus pariwisata, serta pihak dari kementerian pariwisata dengan harapan mendapatkan dukungan dan bantuan teknis terkait pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata alam di Kabupaten Kampar.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Alam di Kabupaten Kampar

Kebijakan publik yang berupa Undang-Undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan penjelasan mengenai kebijakan tersebut, yang biasa disebut sebagai peraturan pelaksanaan. Peraturan daerah merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan maksud untuk memberikan panduan dan landasan hukum bagi aparat pemerintah daerah dalam menjalankan tindakan serta tugas, fungsi, dan tanggung jawab mereka. Setiap kebijakan yang disusun oleh suatu instansi pemerintah daerah pasti akan mengalami tantangan atau hambatan selama proses pelaksanaannya. Tidak terkecuali Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sebagai sektor utama dalam pengembangan pariwisata daerah yang mengatur dan mengelola pariwisata alam di Kabupaten Kampar. Dalam melaksanakan kebijakan pengembangan, pembangunan, dan pengelolaan pariwisata alam di Kabupaten Kampar. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sering kali mengalami kendala-kendala dalam mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu. Adapun hambatan-hambatan dalam implementasi dari kebijakan pariwisata alam di Kabupaten Kampar sebagai berikut:

Status Kepemilikan Lahan

Keberadaan status tanah dan kepemilikan lahan menjadi hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam mengembangkan dan memajukan sektor pariwisata alam di Kabupaten Kampar. Pengembangan pariwisata alam di Kabupaten Kampar terhambat oleh masalah status kepemilikan lahan. Beberapa objek wisata alam di Kabupaten Kampar terletak di kawasan hutan dan berada di tanah milik masyarakat serta tanah ulayat masyarakat adat, sehingga pengembangan wisata alam di Kabupaten Kampar terkesan terhambat. Dengan status hak milik lahan yang masih belum jelas saat ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar tidak bisa mengembangkan dan membangun infrastruktur fisik di lokasi wisata tersebut. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi antara warga pemilik lahan di tempat wisata alam serta dengan Pemerintah Daerah supaya pengembangan wisata alam di Kabupaten Kampar dapat dilakukan dan dikembangkan secara kolaboratif dan saling menguntungkan.

Kondisi Lingkungan

Keadaan lingkungan yang mudah terkena bencana alam, seperti banjir atau longsor, dapat merusak sarana wisata alam di Kabupaten Kampar dan menghambat akses pengunjung ke lokasi wisata alam tersebut. Bencana alam yang kerap terjadi di wilayah wisata alam dapat menghancurkan infrastruktur pariwisata alam dan mengurangi mutu pengalaman pengunjung. Di samping itu, pengelolaan pariwisata alam yang tidak berkelanjutan, seperti pengelolaan limbah yang kurang baik atau konstruksi yang merusak ekosistem, dapat menurunkan daya tarik tempat wisata alam dan merugikan reputasi wilayah sebagai destinasi pariwisata alam. Pengembangan pariwisata alam di Kabupaten Kampar terhambat oleh kondisi lingkungan. Beberapa objek wisata alam di Kabupaten Kampar terletak di daerah yang rentan terkena bencana alam seperti bencana longsor dan banjir. Selain itu pengelolaan limbah plastik yang belum maksimal oleh pengelola pariwisata alam di Kabupaten Kampar menyebabkan tidak nyamannya wisatawan untuk berkunjung lagi ke objek wisata alam di Kabupaten Kampar.

Kurangnya Pelatihan Pengelola Pariwisata Alam dan Masyarakat yang berada di Sekitar Pariwisata Alam

Pertumbuhan pariwisata alam ditentukan oleh cara pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola atau pelaku wisata alam dan masyarakat disekitar pariwisata alam tersebut. Pengelolaan dilakukan dengan menciptakan pola profesionalisme dan pola pengelolaan objek pariwisata alam di Kabupaten Kampar yang siap mendukung aktivitas pariwisata alam serta mampu memanfaatkan potensi pariwisata alam secara berkelanjutan. Untuk pengelolaan objek Pariwisata alam di Kabupaten Kampar belum dilakukan dengan maksimal. Pengelola dan masyarakat yang berada di wilayah objek wisata alam masih banyak yang belum mendapatkan pelatihan mengenai pengembangan pariwisata alam. Pengembangan pariwisata alam di Kabupaten Kampar belum maksimal di sebabkan oleh kurangnya pelatihan yang diadakan oleh pemerintah sehingga berdampak kurangnya pengetahuan pengelola maupun masyarakat yang berada di sekitar objek wisata alam dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang profesional dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Alam di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2020 maka dapat diambil kesimpulan yakni:

1. Penerapan kebijakan pengembangan pariwisata alam di Kabupaten Kampar terbilang berhasil, dengan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata yang dilakukan melalui penyampaian informasi kepada semua pemangku kepentingan dan telah konsisten dalam melakukan komunikasi. Dan sumber daya juga telah mencakup sumber daya manusia, finansial, material, dan informasi, tetapi untuk sumber daya informasi masih ada kekurangan. Untuk konsistensi dilakukan pemantauan rutin melalui forum komunikasi yang melibatkan masyarakat, sehingga potensi masalah bisa segera diminimalisir agar pelaksana dapat cepat mengambil tindakan perbaikan. Disposisi juga telah berjalan dengan lancar yang sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan. Selain itu, dari segi struktur birokrasi untuk pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata alam disusun dalam industri pariwisata dengan SOP untuk Pengelolaan Taman, tempat wisata, dan keselamatan pengunjung, sehingga dampak negatif bagi wisatawan dapat diminimalisir jika terjadi sesuatu.
2. Ada beberapa faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata alam di Kabupaten Kampar, dimana beberapa objek wisata alam berada di kawasan hutan dan berada di tanah milik masyarakat serta tanah ulayat masyarakat adat, sehingga pengembangan wisata alam di Kabupaten Kampar terkesan terhambat. Dengan status hak milik lahan yang masih belum jelas saat ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar tidak bisa mengembangkan dan membangun infrastruktur fisik di lokasi wisata tersebut. pengembangan pariwisata alam di Kabupaten Kampar terhambat oleh kondisi lingkungan. Beberapa objek wisata alam di Kabupaten Kampar terletak di daerah yang rentan terkena bencana alam seperti bencana longsong dan banjir. Selain itu, kurangnya pelatihan yang diadakan oleh pemerintah sehingga berdampak kurangnya pengetahuan pengelola maupun masyarakat yang berada di sekitar objek wisata alam dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang profesional dan berkelanjutan.

Saran

Melalui hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti merekomendasikan saran sebagai berikut:

1. Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar diharapkan agar membuat inovasi dalam komunikasi atau dalam penyampaian informasi kepada masyarakat yang berada di daerah yang sulit terjangkau serta dalam aspek konsisten dalam pengembangan pariwisata harus melibatkan masyarakat setempat agar pariwisata alam lebih baik dalam segi pengembangannya.
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar diharapkan memberikan terobosan dan kebijakan dari permasalahan objek wisata alam berada di kawasan hutan dan berada di tanah milik masyarakat serta tanah ulayat masyarakat adat, sehingga pengembangan pariwisata alam di Kabupaten Kampar tidak mengalami hambatan dan pengelola objek wisata tidak terhambat dengan regulasi yang ada serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar harus lebih memperhatikan aspek keselamatan wisatawan yang berkunjung ke wisata alam yang berada di kawasan yang rawan terhadap bencana alam dengan melakukan pembangunan dan pengembangan di daerah rawan bencana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. CV. Syakir Media Press.
- Agustino, Leo. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik Edisi Revisi Ke-2*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Ahmad Hanif. (2021). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Semarang Pada Obyek Wisata Palagan Ambarawa*. Skripsi Administrasi Publik
- Andyani, Febi Dwi. (2020). *Implementasi Kebijakan Publik (Studi Kasus Pada Kartu Sehat Bekasi Tahun 2017 dan 2018)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Antika, Mala. (2017). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Industri Kecil dan Menengah di Desa Sidodadi Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Anugrah, H. I. (2020). *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 12(2), 51-65.
- Baharuddin, T. (2020). *Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019*. Journal of Governance and Local Politics (JGLP), 2(2), 151-163
- Delly, Anwar, F., & Patrisia, N. E. (2019). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu*. Jurnal Manajemen Publik, 1(September), 27–41.
- Ekel, A. F. (2020). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata Di Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Administrasi Publik, 6(92).
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Imamuddin dkk. (2021). *Kebijakan Publik*. Bandung: Widina Media Utama.
- Joko Pramono. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Solo: UNISRI Press.
- Kagungan, D., & Duadji, N. (2021). *Manajemen Pembangunan (Suatu Kajian Manajemen Pembangunan Bidang Kepariwisataan) (1st ed.)*. Graha Ilmu.
- Masayu Rosidah. (2020). *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish.
- Miranda W. (2018). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Yogyakarta*. Skripsi Ilmu Pemerintahan.
- Novita Tresiana dan Noverman Duadji. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik (Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi)*. Bandar Lampung:Suluh Media.
- Nurmanika. (2018). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Samboang di Kabupaten Bulukumba*. Skripsi Ilmu Administrasi Negara.

- Nurseptiani, D., & Mustam, M. (2016). *Strategi Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Semarang*. Journal of Public Policy and Management Review, 5(2), 391–396. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v2i2.209>
- Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kampar Tahun 2020-2025 kebijakan pembangunan kepariwisataan
- Puspitasari, E. A., & Darmawan, A. (2017). *Pariwisata Untuk Pengembangan Infrastruktur Pariwisata (Studi pada Desa Wisata Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo , Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Bisnis, 43(1), 132 137.
- Sapto Haryoko. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Makasar : Badan Penerbit UMN.
- Subarsono. (2020). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suharyanti, N. (2020). *Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengembangan Pariwisata*. Jurnal Hukum Saraswati, 2(2), 169-181.
- Tommi. (2021). *Implementasi Program Wisata Dalam Meningkatkan Pendapaan Asli Desa Marente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa*. Skripsi Ilmu Pemerintahan
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Induk
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
- Widyanarko, O. (2020). *Implementasi Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelaanjutan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 9(1), 51–55.